E-ISSN : 2988-1986
https://ejournal.warunayama.org/kohesi

Kohesi: Jurnal Multidisiplin Saintek
Volume 9 No 6 Tahun 2025

# PERAN WEBSITE DESA DALAM MENINGKATKAN TRANSPARANSI ANGGARAN PEMERINTAH DI TIMIKA JAYA

**Agustinus Putra Rano Werimon[1*], Mohammad Rezza Fahlevvi[2], Asri Buding[3]**
[1*,2,3] Teknologi Rekayasa Informasi Pemerintahan, Institut Pemerintahan Dalam Negeri, Jatinangor, Sumedang
**e-mail:** [1*] zanettyputra1980@gmail.com, [2]rezza@ipdn.ac.id, [3]asribugis 1652@gmail.com

**Abstrak**

Transparansi anggaran merupakan elemen krusial dalam membentuk tata kelola desa yang akuntabel dan partisipatif. Dalam era digital, website desa menjadi media strategis untuk mendistribusikan informasi anggaran kepada publik. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran website Desa Timika Jaya dalam meningkatkan transparansi anggaran pemerintah desa. Pendekatan kualitatif deskriptif digunakan dengan teknik wawancara, observasi, dan kuesioner terhadap perangkat desa dan masyarakat. Hasil menunjukkan bahwa publikasi APBDes di website desa berdampak positif terhadap partisipasi, di mana 68% responden merasa lebih percaya dalam pengawasan dana desa setelah mengakses informasi daring. Namun, tantangan seperti literasi digital rendah (tercatat 42% warga tidak tahu cara akses website) dan minimnya pembaruan konten menjadi hambatan utama. Oleh karena itu, penguatan kapasitas SDM dan infrastruktur digital mutlak diperlukan guna menjadikan website desa sebagai alat efektif dalam mendorong transparansi anggaran.

**Kata Kunci**: Website Desa, Transparansi, Anggaran, Pemerintah, Timika Jaya

**Article History**
Received: Juli 2025
Reviewed: Juli 2025
Published: Juli 2025

Plagiarism Checker No 690
Prefix DOI : Prefix DOI : 10.8734/Kohesi.v1i2.365
**Copyright : Author**
**Publish by : Kohesi**

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License

## PENDAHULUAN

### 1.1.1 Latar Belakang

Dalam era digitalisasi saat ini, tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) menjadi tuntutan utama, terutama dalam hal transparansi dan akuntabilitas penggunaan anggaran publik. Pemerintah desa sebagai ujung tombak pelayanan publik memiliki tanggung jawab besar dalam memastikan bahwa proses perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan anggaran dilakukan secara terbuka dan dapat diakses oleh masyarakat. Salah satu instrumen yang dapat digunakan untuk mewujudkan transparansi tersebut adalah melalui pemanfaatan website desa.

Website desa merupakan salah satu bentuk implementasi e-government yang memungkinkan pemerintah desa untuk menyampaikan berbagai informasi secara daring kepada publik, termasuk informasi tentang anggaran pendapatan dan belanja desa (APBDes), laporan realisasi anggaran, serta kegiatan pembangunan. Pemanfaatan website desa tidak hanya bertujuan untuk meningkatkan efisiensi komunikasi antara pemerintah dan masyarakat, tetapi juga sebagai upaya memperkuat partisipasi masyarakat dalam proses pengawasan anggaran.

Desa Timika Jaya, sebagai salah satu desa yang berada di wilayah yang tengah berkembang di Papua, memiliki tantangan tersendiri dalam hal transparansi dan pengelolaan informasi publik. Keterbatasan infrastruktur, akses internet, dan literasi digital masyarakat menjadi faktor penting yang mempengaruhi efektivitas pemanfaatan website desa. Namun, di sisi lain,

terdapat komitmen dari pemerintah desa untuk mendorong keterbukaan informasi publik sebagai bagian dari pelayanan yang lebih baik.

Transparansi anggaran di tingkat desa sangat penting karena menyangkut kepercayaan publik terhadap pemerintah desa. Dalam banyak kasus, ketertutupan informasi anggaran sering menjadi pemicu timbulnya konflik horizontal, kecurigaan terhadap penyalahgunaan dana desa, serta rendahnya partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan. Oleh karena itu, dengan adanya media digital seperti website desa, diharapkan dapat terjadi perubahan paradigma dari pemerintahan yang tertutup menjadi pemerintahan yang terbuka dan akuntabel.

Website Desa Timika Jaya sudah dibangun dan mulai dioperasikan dalam beberapa tahun terakhir. Namun, efektivitas penggunaannya sebagai media transparansi anggaran belum sepenuhnya optimal. Hal ini mendorong perlunya kajian ilmiah untuk menganalisis bagaimana sebenarnya peran website desa tersebut dalam meningkatkan transparansi anggaran pemerintah, khususnya di Desa Timika Jaya. Apakah informasi anggaran yang ditampilkan sudah lengkap dan mudah dipahami masyarakat? Apakah website tersebut diakses oleh masyarakat secara rutin? Apa saja kendala yang dihadapi pemerintah desa dalam mengelola dan memperbarui informasi di website?

Melalui penelitian ini, diharapkan dapat ditemukan gambaran yang jelas mengenai peran aktual website desa dalam meningkatkan keterbukaan informasi anggaran dan sejauh mana masyarakat Desa Timika Jaya memanfaatkan platform digital ini untuk mengakses informasi terkait pengelolaan anggaran desa.

### 1.1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

Bagaimana peran website Desa Timika Jaya dalam meningkatkan transparansi anggaran pemerintah desa?

Apa saja kendala yang dihadapi dalam pengelolaan dan pemanfaatan website desa sebagai media transparansi anggaran?

### 1.1.3 Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk:

Menganalisis peran website desa sebagai media untuk meningkatkan transparansi anggaran di Desa Timika Jaya.

Mengidentifikasi hambatan-hambatan yang dihadapi dalam pengelolaan dan pemanfaatan website desa dalam konteks transparansi anggaran

### 1.1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat Teoritis: Menambah referensi dan literatur akademik mengenai pemanfaatan teknologi informasi dalam tata kelola pemerintahan desa, khususnya terkait transparansi anggaran melalui media digital.

Manfaat Praktis: Memberikan masukan dan rekomendasi kepada pemerintah desa, khususnya di Desa Timika Jaya, dalam meningkatkan efektivitas penggunaan website desa sebagai sarana penyampaian informasi anggaran kepada masyarakat.

## TINJAUAN PUSTAKA

### 2.2.1 Website Desa

Website desa merupakan salah satu bentuk implementasi dari e-government di tingkat pemerintahan desa. Nugroho (2009) menyebutkan bahwa e-government adalah penggunaan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) untuk meningkatkan efisiensi, transparansi, akuntabilitas, dan pelayanan publik. Dalam konteks pemerintahan desa, website desa berfungsi sebagai media untuk menyampaikan informasi kepada publik, termasuk anggaran dan kegiatan pembangunan yang dilaksanakan oleh desa.

Menurut Permendagri No. 47 Tahun 2016 tentang Administrasi Pemerintahan Desa, salah satu kewajiban pemerintah desa adalah menyediakan informasi yang dapat diakses oleh masyarakat, salah satunya melalui website desa. Website desa dapat mencakup berbagai informasi seperti anggaran pendapatan dan belanja desa (APBDes), laporan kegiatan, serta pengumuman lainnya yang penting bagi masyarakat.

Namun, efektivitas website desa sangat bergantung pada beberapa faktor, seperti kualitas infrastruktur TIK, kapasitas aparat desa dalam mengelola website, serta tingkat literasi digital masyarakat. Keterbatasan di beberapa area, terutama di daerah terpencil, dapat mempengaruhi keberhasilan penggunaan website desa sebagai alat transparansi anggaran.

### 2.2.2 Transparansi Anggaran

Transparansi anggaran mengacu pada keterbukaan dalam penyajian dan pengelolaan anggaran publik, yang memungkinkan masyarakat untuk memantau dan mengawasi penggunaan dana pemerintah. Folscher (2002) menjelaskan bahwa transparansi anggaran mencakup akses publik terhadap informasi yang lengkap, akurat, tepat waktu, dan mudah dipahami. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas dan mengurangi potensi penyalahgunaan dana publik.

Dalam konteks pemerintahan desa, transparansi anggaran sangat penting mengingat dana desa yang diterima tiap tahun. UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa mengharuskan pemerintah desa untuk menyelenggarakan pengelolaan keuangan yang transparan, akuntabel, dan partisipatif. Oleh karena itu, setiap desa diwajibkan untuk menginformasikan APBDes dan realisasi anggaran kepada masyarakat. Website desa menjadi salah satu sarana yang efektif untuk memenuhi kewajiban ini, karena masyarakat dapat dengan mudah mengakses informasi terkait pengelolaan keuangan desa secara online.

Melalui transparansi anggaran, masyarakat dapat berperan aktif dalam mengawasi dan memberi masukan terhadap penggunaan anggaran desa. Hal ini dapat memperkuat kepercayaan publik dan mendorong pemerintahan desa untuk lebih akuntabel dalam menjalankan program-program pembangunan.

### 2.2.3 E-Government dan Pemerintahan Desa

E-government adalah penerapan teknologi informasi dan komunikasi untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan publik. Indrajit (2002) mengemukakan bahwa e-government memiliki tujuan utama untuk meningkatkan kualitas pelayanan, efisiensi operasional, transparansi, dan partisipasi publik. Di tingkat desa, e-government berwujud dalam bentuk layanan berbasis teknologi, salah satunya melalui website desa yang dapat mempermudah akses informasi bagi masyarakat.

Website desa merupakan implementasi nyata dari e-government yang memungkinkan pemerintah desa untuk menyediakan berbagai informasi terkait anggaran, program pembangunan, dan laporan keuangan secara terbuka. Namun, untuk mencapai tujuan e-

government yang optimal, terdapat berbagai tantangan yang harus dihadapi, seperti kurangnya infrastruktur TIK di daerah terpencil, keterbatasan dana, serta rendahnya tingkat literasi digital aparat desa dan masyarakat.

Meskipun demikian, website desa dapat menjadi sarana yang efektif untuk mendekatkan pemerintah kepada masyarakat, meningkatkan transparansi, dan mendorong partisipasi publik dalam pengawasan anggaran dan pembangunan desa. Oleh karena itu, penerapan e-government di tingkat desa sangat penting dalam menciptakan pemerintahan yang lebih terbuka dan akuntabel.

### 2.2.4 Partisipasi Masyarakat dalam Pengawasan Anggaran

Partisipasi masyarakat merupakan salah satu pilar dalam pemerintahan yang demokratis. Arnstein (1969) dalam teorinya tentang Ladder of Citizen Participation menyatakan bahwa partisipasi yang ideal adalah ketika masyarakat tidak hanya diberi kesempatan untuk memberikan masukan, tetapi juga memiliki pengaruh nyata dalam pengambilan keputusan. Dalam hal pengawasan anggaran, partisipasi masyarakat sangat penting untuk memastikan bahwa dana desa digunakan sesuai dengan peruntukannya.

Melalui website desa, masyarakat dapat mengakses informasi terkait anggaran dan kegiatan pembangunan desa. Ketika masyarakat memiliki informasi yang jelas dan akurat, mereka dapat lebih aktif dalam mengawasi pelaksanaan anggaran, memberikan masukan, serta mendorong transparansi dalam pengelolaan dana desa. Dengan demikian, website desa dapat menjadi alat yang efektif untuk memperkuat partisipasi masyarakat dalam pengawasan anggaran dan pembangunan desa.

### 2.2.5 Studi Terdahulu

Beberapa studi terdahulu telah menunjukkan pentingnya website desa dalam meningkatkan transparansi anggaran. Penelitian oleh Sari (2020) di Kabupaten Sleman menemukan bahwa desa-desa yang aktif mengelola website memiliki tingkat partisipasi masyarakat yang lebih tinggi dan lebih sedikit mengalami masalah terkait pengelolaan dana desa. Demikian juga, Putra (2021) dalam penelitiannya di Kabupaten Banyuwangi menunjukkan bahwa website desa yang dikelola dengan baik dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah desa, sehingga mengurangi potensi penyalahgunaan dana desa.

Namun, meskipun banyak penelitian yang menunjukkan manfaat positif dari website desa, masih ada desa-desa yang kesulitan dalam memanfaatkan teknologi ini secara maksimal. Beberapa kendala yang ditemukan adalah terbatasnya infrastruktur, kurangnya pelatihan bagi aparat desa dalam mengelola website, dan rendahnya literasi digital masyarakat. Oleh karena itu, perlu adanya upaya yang lebih serius dalam mengatasi kendala-kendala tersebut agar website desa dapat berfungsi secara optimal dalam meningkatkan transparansi anggaran.

### 2.2.6 Studi dari Daerah dengan Kondisi Serupa

Penelitian mengenai transparansi anggaran melalui media digital di wilayah Papua telah dilakukan di berbagai desa dengan kondisi geografis dan sosial yang serupa dengan Desa Timika Jaya. Misalnya, studi oleh Rahail (2022) mengenai pemanfaatan website desa di Kampung Yoboi, Kabupaten Jayapura, menunjukkan bahwa publikasi APBDes secara daring dapat meningkatkan keterlibatan warga dalam proses pengawasan meskipun masih dihadapkan pada kendala jaringan internet yang tidak stabil. Di Kampung Banti, Kabupaten Mimika, penelitian oleh Tanati (2021) menggarisbawahi pentingnya pendampingan teknis oleh komunitas TIK lokal agar masyarakat tidak hanya menjadi pengguna pasif, melainkan juga dapat berkontribusi dalam pelaporan isu-isu pembangunan desa melalui kanal digital yang tersedia.

Studi-studi tersebut menegaskan bahwa pemanfaatan website desa bukan hanya tentang penyediaan informasi semata, tetapi juga berkaitan dengan pendekatan sosio-teknis yang adaptif terhadap kondisi lokal, seperti budaya gotong royong, kesenjangan literasi digital, dan akses infrastruktur. Konteks Papua yang memiliki keterbatasan distribusi layanan internet dan letak geografis yang terpencil memerlukan pendekatan yang berbeda dibandingkan dengan wilayah-wilayah yang lebih urban. Oleh karena itu, peran aktif perangkat desa dan kolaborasi lintas aktor menjadi kunci keberhasilan website desa sebagai media transparansi anggaran.

### 2.2.7 Model-Model Transparansi Anggaran

Dalam studi global tentang keterbukaan fiskal, salah satu instrumen yang banyak digunakan adalah Open Budget Index (OBI) yang dikembangkan oleh International Budget Partnership (IBP). OBI mengevaluasi sejauh mana pemerintah menyediakan informasi anggaran secara publik, meliputi dokumen anggaran yang disediakan, partisipasi publik, dan fungsi pengawasan legislatif serta lembaga audit. Meskipun indeks ini umumnya diterapkan pada tingkat nasional, prinsip-prinsipnya dapat diadaptasi ke tingkat lokal, termasuk di desa, untuk mendorong tata kelola keuangan yang lebih akuntabel dan partisipatif.

Selain OBI, model Participatory Budgeting (PB) juga menjadi pendekatan penting dalam konteks transparansi dan partisipasi masyarakat. Participatory Budgeting pertama kali dikembangkan di Porto Alegre, Brasil, dan telah diterapkan di berbagai wilayah dengan tujuan untuk melibatkan warga secara langsung dalam proses perencanaan dan pengalokasian anggaran publik. Dalam konteks desa, prinsip PB dapat diterapkan melalui forum musyawarah desa berbasis data dan teknologi digital, termasuk publikasi rancangan dan realisasi APBDes di website desa yang interaktif. PB menekankan prinsip deliberatif, inklusif, dan transparan—hal yang sangat relevan untuk memperkuat demokratisasi informasi fiskal di desa-desa seperti Timika Jaya.

Melalui pemanfaatan pendekatan seperti OBI dan PB, desa tidak hanya menyampaikan informasi anggaran sebagai kewajiban administratif, tetapi juga membangun ruang komunikasi timbal balik yang membuka jalan bagi kepercayaan dan kolaborasi antara pemerintah desa dan warganya.

## METODE PENELITIAN

Pada bagian ini, akan dijelaskan mengenai pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini, jenis data yang dikumpulkan, teknik pengumpulan data, serta teknik analisis data yang digunakan untuk menjawab rumusan masalah.

Proses analisis data kualitatif dilakukan melalui tahapan coding manual dengan identifikasi tema berdasarkan kemunculan berulang dalam wawancara dan pengisian kuesioner. Validitas data diuji melalui triangulasi antar sumber (perangkat desa, masyarakat, dokumen APBDes), dan cross-check hasil observasi langsung dengan pernyataan responden. Selain itu, peneliti menyusun diagram hubungan antar tema untuk mengungkap pola-pola keterkaitan antara partisipasi masyarakat dan pemanfaatan informasi digital desa.

### 3.3.1 Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif yang bertujuan untuk menggambarkan dan menganalisis peran website desa dalam meningkatkan transparansi anggaran pemerintah di Desa Timika Jaya. Pendekatan kualitatif dipilih karena memungkinkan peneliti untuk mendalami dan memahami fenomena yang terjadi secara lebih mendalam dan kontekstual. Penelitian ini berfokus pada bagaimana website desa digunakan untuk

menyampaikan informasi anggaran dan sejauh mana masyarakat terlibat dalam pengawasan anggaran desa.

### 3.3.2 Jenis Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari dua jenis, yaitu:

Data Primer: Data yang diperoleh langsung dari responden yang terlibat dalam pengelolaan website desa, seperti perangkat desa, anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD), dan masyarakat pengguna website desa. Data primer dikumpulkan melalui wawancara, observasi, dan kuesioner.

Data Sekunder: Data yang diperoleh dari sumber yang sudah ada sebelumnya, seperti dokumen APBDes, laporan keuangan desa, dan data terkait pengelolaan website desa yang dapat diakses oleh publik.

### 3.3.3 Teknik Pengumpulan Data

Untuk mengumpulkan data yang diperlukan, penelitian ini menggunakan beberapa teknik berikut:

Wawancara Mendalam: Peneliti melakukan wawancara dengan perangkat desa, anggota BPD, dan masyarakat untuk menggali pandangan mereka mengenai pemanfaatan website desa dalam transparansi anggaran. Wawancara dilakukan dengan menggunakan panduan wawancara semi-terstruktur, yang memungkinkan peneliti untuk mendapatkan informasi yang lebih kaya dan mendalam.

Observasi: Peneliti melakukan observasi langsung terhadap pengelolaan website desa di Timika Jaya, baik dari segi tampilan, fitur, maupun aksesibilitas informasi anggaran yang disediakan di website tersebut.

Kuesioner: Kuesioner disebarkan kepada masyarakat desa untuk mengukur pemahaman mereka mengenai transparansi anggaran yang disampaikan melalui website desa dan tingkat partisipasi mereka dalam pengawasan anggaran.

### 3.3.4 Teknik Analisis Data

Data yang diperoleh dari wawancara, observasi, dan kuesioner akan dianalisis menggunakan teknik analisis data kualitatif. Langkah-langkah analisis yang dilakukan adalah

Pengkodean (Coding): Proses pengkodean dilakukan untuk mengidentifikasi tema-tema utama yang muncul dari data wawancara dan kuesioner. Tema-tema ini akan berkaitan dengan peran website desa, transparansi anggaran, dan partisipasi masyarakat.

Kategorisasi: Setelah pengkodean, data akan dikelompokkan dalam kategori-kategori tertentu sesuai dengan fokus penelitian, seperti pengelolaan website desa, kendala yang dihadapi, dan tingkat transparansi anggaran yang dirasakan masyarakat.

Analisis Tematik: Analisis tematik dilakukan untuk menemukan pola-pola yang muncul dalam data, yang dapat memberikan pemahaman lebih dalam tentang bagaimana website desa berperan dalam meningkatkan transparansi anggaran di Timika Jaya.

Triangulasi Data: Untuk memastikan kevalidan data, dilakukan triangulasi dengan membandingkan hasil wawancara dengan observasi dan kuesioner. Triangulasi ini penting untuk mengurangi bias dan memperoleh pemahaman yang lebih akurat tentang fenomena yang diteliti.

## HASIL PENELITIAN

### 4.4 Peran Website Desa dalam Meningkatkan Transparansi Anggaran di Timika Jaya

Website desa di Timika Jaya telah berperan penting dalam meningkatkan transparansi anggaran pemerintah desa. Secara umum, website desa berfungsi sebagai media untuk menyampaikan berbagai informasi terkait anggaran, penggunaan dana desa, dan program-program pembangunan yang dilaksanakan oleh pemerintah desa. Dalam konteks ini, website desa tidak hanya sekadar menjadi alat untuk menyampaikan informasi, tetapi juga sebagai sarana untuk meningkatkan akuntabilitas dan partisipasi masyarakat dalam pengawasan anggaran.

#### 4.4.1 Penyampaian Informasi Anggaran yang Lebih Terbuka

Website desa Timika Jaya memuat berbagai informasi penting terkait anggaran desa, seperti Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) serta laporan realisasi anggaran setiap tahun. Informasi ini disajikan secara jelas dan mudah diakses oleh masyarakat, yang sebelumnya mungkin sulit untuk mengetahui rincian anggaran dan penggunaan dana desa secara langsung. Penyampaian informasi anggaran melalui website memungkinkan masyarakat untuk mengakses data tersebut kapan saja, tanpa perlu menunggu rapat atau pertemuan formal.

Dalam hal ini, transparansi anggaran yang dihasilkan oleh penggunaan website desa memberi dampak positif terhadap pemahaman masyarakat tentang bagaimana anggaran desa dikelola. Masyarakat dapat melihat alokasi dana untuk berbagai program pembangunan desa, seperti pembangunan infrastruktur, pemberdayaan masyarakat, dan program sosial lainnya. Hal ini meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai penggunaan dana desa yang lebih efisien dan terencana dengan baik.

#### 4.4.2 Meningkatkan Akuntabilitas Pemerintah Desa

Website desa juga berperan dalam meningkatkan akuntabilitas pemerintah desa. Dengan adanya website yang memuat laporan keuangan yang dapat diakses oleh publik, pemerintah desa dapat lebih mudah dipertanggungjawabkan atas setiap penggunaan anggaran. Selain itu, laporan yang tersedia di website desa memudahkan pihak-pihak terkait, seperti Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan aparat kecamatan, untuk melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan anggaran.

Website desa di Timika Jaya memungkinkan masyarakat untuk melihat laporan realisasi anggaran secara transparan, termasuk rincian pengeluaran dan sumber penerimaan anggaran. Ketika informasi ini dipublikasikan secara terbuka, pemerintah desa akan lebih sulit untuk melakukan penyalahgunaan atau manipulasi data keuangan. Ini mendorong pemerintah desa untuk lebih hati-hati dan bertanggung jawab dalam mengelola anggaran, karena mereka tahu bahwa setiap penggunaan dana desa dapat dipertanyakan oleh masyarakat.

#### 4.4.3 Mendorong Partisipasi Masyarakat dalam Pengawasan Anggaran

Salah satu keuntungan besar dari website desa adalah kemampuannya untuk mendorong partisipasi masyarakat dalam pengawasan anggaran. Dengan akses yang lebih mudah terhadap informasi anggaran yang tersedia di website desa, masyarakat dapat berperan aktif dalam memantau penggunaan dana desa. Sebagai contoh, jika masyarakat mengetahui adanya alokasi dana untuk pembangunan infrastruktur, mereka dapat mengajukan pertanyaan atau memberikan masukan mengenai bagaimana dan di mana dana tersebut digunakan.

Dalam penelitian ini, ditemukan bahwa masyarakat Timika Jaya yang mengakses website desa merasa lebih terlibat dalam pengawasan anggaran dibandingkan dengan mereka yang tidak tahu tentang informasi yang ada di website. Sebagian besar responden menyatakan bahwa mereka

merasa lebih percaya diri untuk memberikan masukan kepada pemerintah desa mengenai pengelolaan dana desa setelah mengetahui secara langsung bagaimana dana tersebut digunakan.

Selain itu, website desa juga membuka peluang bagi masyarakat untuk memberikan feedback atau laporan terkait program-program yang tidak berjalan sesuai rencana. Fitur seperti forum diskusi atau kolom pengaduan dapat dimanfaatkan oleh masyarakat untuk menyampaikan pendapat atau keluhan mereka mengenai penggunaan dana desa. Hal ini tidak hanya memperkuat akuntabilitas pemerintah desa, tetapi juga memperkuat hubungan antara pemerintah desa dan masyarakat.

### 4.4.4 Mengatasi Tantangan Aksesibilitas dan Infrastruktur TIK

Namun, meskipun website desa di Timika Jaya memberikan dampak positif terhadap transparansi anggaran, terdapat beberapa tantangan yang perlu diatasi. Salah satu tantangan utama adalah keterbatasan aksesibilitas dan infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) di beberapa bagian desa. Meskipun desa ini telah memiliki website yang berfungsi dengan baik, tidak semua masyarakat memiliki akses internet yang memadai untuk mengakses informasi yang tersedia.

Beberapa wilayah di Timika Jaya, terutama daerah yang lebih terpencil, masih mengalami kesulitan dalam mengakses internet dengan lancar. Hal ini dapat membatasi sejauh mana masyarakat dapat memanfaatkan website desa untuk memperoleh informasi anggaran dan terlibat dalam pengawasan. Oleh karena itu, perlu ada upaya untuk meningkatkan infrastruktur TIK di tingkat desa, seperti penyediaan jaringan internet yang lebih stabil dan penyuluhan tentang literasi digital kepada masyarakat.

Selain itu, kemampuan aparatur desa dalam mengelola dan memperbarui website juga menjadi faktor penting. Penelitian ini menunjukkan bahwa meskipun sebagian besar perangkat desa sudah memiliki keterampilan dasar dalam mengelola website, masih ada beberapa perangkat desa yang membutuhkan pelatihan lebih lanjut mengenai pemeliharaan dan pengelolaan konten di website desa. Pelatihan ini penting agar website desa dapat tetap relevan, terupdate, dan dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat.

### 4.4.5 Dampak terhadap Kepercayaan Masyarakat Terhadap Pemerintah Desa

Salah satu hasil yang paling signifikan dari adanya website desa dalam meningkatkan transparansi anggaran adalah peningkatan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah desa. Masyarakat yang memiliki akses langsung terhadap informasi anggaran merasa lebih dihargai dan dilibatkan dalam proses pengambilan keputusan yang berkaitan dengan penggunaan dana desa. Hal ini berdampak pada terciptanya hubungan yang lebih positif antara pemerintah desa dan masyarakat, serta meningkatkan tingkat kepuasan publik terhadap pelayanan pemerintah.

Selain itu, peningkatan transparansi anggaran melalui website desa juga membantu mencegah potensi konflik atau ketidakpuasan yang mungkin timbul akibat ketidaktahuan masyarakat terhadap penggunaan dana desa. Dengan memberikan informasi yang jelas dan terbuka, pemerintah desa di Timika Jaya dapat mengurangi persepsi negatif yang mungkin ada di masyarakat terkait pengelolaan keuangan desa.

### 4.4.6 Hasil Kuesioner Dan Observasi Lapangan

Untuk memperjelas hasil penelitian, berikut disajikan ringkasan data hasil kuesioner dan observasi lapangan mengenai pemanfaatan website desa Timika Jaya dalam mendukung transparansi anggaran.

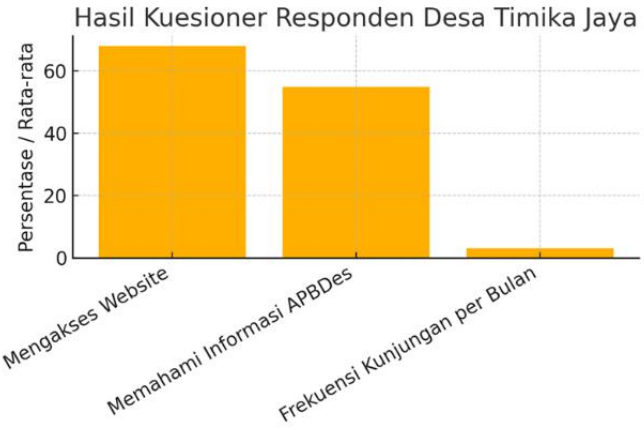


### 5.5 Kekuatan dan Kelemahan Penelitian

#### 5.5.1 Kekuatan Penelitian

Penelitian ini memiliki sejumlah kekuatan yang signifikan dalam mendukung kualitas dan relevansinya. Pertama, topik penelitian sangat aktual dan relevan, terutama dalam konteks tata kelola pemerintahan desa di era digital. Pemanfaatan website desa sebagai alat untuk meningkatkan transparansi anggaran mencerminkan upaya integrasi teknologi informasi dalam mendorong pemerintahan yang lebih terbuka dan akuntabel. Topik ini tidak hanya penting dari sisi akademik, tetapi juga memiliki dampak praktis yang luas terhadap pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat desa.

Kedua, pendekatan kualitatif deskriptif yang digunakan dalam penelitian ini tepat untuk mengeksplorasi fenomena secara mendalam. Melalui wawancara, observasi, dan kuesioner, peneliti mampu menggali pandangan dari berbagai aktor desa yang terlibat secara langsung dalam pengelolaan informasi dan anggaran. Hal ini memungkinkan pemahaman yang lebih kaya terhadap kondisi lapangan, yang sering kali tidak terjangkau oleh metode kuantitatif.

Ketiga, fokus penelitian pada partisipasi masyarakat sebagai subjek aktif dalam pengawasan anggaran menjadi nilai tambah yang penting. Dalam konteks demokratisasi informasi dan penguatan kontrol sosial, keberadaan masyarakat sebagai pengawas dana desa mencerminkan implementasi prinsip-prinsip good governance yang sejati. Penelitian ini berhasil menyoroti bagaimana keterlibatan masyarakat dapat dipicu dan difasilitasi melalui kanal digital.

Keempat, triangulasi data yang digunakan untuk menguji validitas hasil merupakan langkah metodologis yang kuat. Dengan membandingkan data dari berbagai sumber (wawancara, observasi, dan dokumen resmi), peneliti berhasil menyusun temuan yang lebih objektif dan mendalam. Proses ini penting untuk menghindari bias persepsi dan memberikan keyakinan bahwa hasil yang diperoleh benar-benar mencerminkan kondisi sebenarnya.

#### 5.5.2 Kelemahan Penelitian

Di sisi lain, terdapat beberapa kelemahan yang perlu dicermati. Salah satunya adalah keterbatasan cakupan wilayah dan jumlah responden yang dilibatkan. Penelitian hanya berfokus pada satu desa, yaitu Timika Jaya, tanpa melakukan perbandingan dengan desa lain yang memiliki kondisi serupa. Hal ini membatasi generalisasi hasil penelitian dan potensi komparasi antarwilayah.

Selain itu, penelitian ini belum secara maksimal memanfaatkan data kuantitatif untuk memperkuat temuan. Misalnya, tidak ada pembandingan statistik terkait tingkat partisipasi masyarakat sebelum dan sesudah pemanfaatan website desa, atau data mengenai peningkatan

frekuensi akses website dari waktu ke waktu. Padahal data kuantitatif semacam itu dapat memberikan gambaran lebih konkret mengenai dampak implementasi website terhadap transparansi.

Kelemahan lainnya terletak pada keterbatasan analisis terhadap variabel eksternal seperti pengaruh kebijakan daerah, peran pemerintah kabupaten, atau dukungan infrastruktur dari sektor swasta dalam menunjang digitalisasi desa. Padahal faktor-faktor tersebut turut berperan dalam keberhasilan pemanfaatan website desa sebagai alat transparansi.

Terakhir, belum tergarapnya aspek keberlanjutan (sustainability) dari implementasi website desa menjadi kekurangan penting. Penelitian belum membahas secara mendalam bagaimana desa mempertahankan fungsi transparansi ini dalam jangka panjang, termasuk dalam hal pendanaan, pembaruan teknologi, dan pergantian sumber daya manusia yang mengelola website.

## KESIMPULAN DAN SARAN

### 6.6.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, dapat disimpulkan bahwa website desa di Timika Jaya telah memberikan peran yang signifikan dalam meningkatkan transparansi anggaran pemerintah desa. Website ini berfungsi sebagai sarana yang efektif untuk menyampaikan informasi anggaran kepada masyarakat, yang sebelumnya sulit diakses secara langsung. Dengan adanya website desa, masyarakat dapat mengetahui secara jelas bagaimana dana desa digunakan dan alokasi anggaran untuk berbagai program pembangunan.

Selain itu, website desa juga berperan dalam meningkatkan akuntabilitas pemerintah desa. Adanya laporan keuangan yang dapat diakses oleh publik mempermudah masyarakat untuk memantau penggunaan dana desa dan memastikan bahwa anggaran dikelola dengan baik. Akuntabilitas yang tinggi ini menciptakan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah desa, yang pada gilirannya meningkatkan partisipasi aktif mereka dalam pengawasan anggaran.

Partisipasi masyarakat dalam pengawasan anggaran melalui website desa juga menjadi salah satu temuan penting dalam penelitian ini. Website desa memungkinkan masyarakat untuk memberikan masukan, pertanyaan, atau keluhan terkait penggunaan dana desa. Hal ini menjadikan website sebagai alat yang tidak hanya menyampaikan informasi, tetapi juga memfasilitasi dialog antara pemerintah desa dan masyarakat.

Namun, meskipun banyak manfaat yang diperoleh, penelitian ini juga mengidentifikasi beberapa tantangan yang dihadapi dalam implementasi website desa, seperti keterbatasan akses internet di beberapa daerah terpencil dan keterbatasan kapasitas sumber daya manusia dalam mengelola website secara optimal. Oleh karena itu, pengembangan lebih lanjut dalam hal infrastruktur TIK dan pelatihan aparat desa menjadi hal yang sangat penting untuk memastikan keberlanjutan dan efektivitas website desa dalam meningkatkan transparansi anggaran.

### 6.6.2 Saran

Berdasarkan temuan dan kesimpulan yang telah disampaikan, berikut adalah beberapa saran yang dapat diajukan untuk meningkatkan efektivitas penggunaan website desa dalam meningkatkan transparansi anggaran di Timika Jaya

1) Peningkatan Infrastruktur TIK

Pemerintah desa perlu berkoordinasi dengan pihak terkait untuk meningkatkan infrastruktur TIK di daerah-daerah yang masih terbatas akses internetnya. Penyediaan akses internet yang lebih baik akan memungkinkan seluruh masyarakat desa untuk mengakses informasi yang tersedia di website desa dengan lebih mudah dan cepat.

2) Pelatihan untuk Aparat Desa

Pelatihan yang lebih intensif mengenai pengelolaan website dan literasi digital perlu diberikan kepada perangkat desa. Hal ini penting untuk memastikan bahwa website desa dapat dikelola dengan baik dan tetap relevan dengan kebutuhan masyarakat. Selain itu, pelatihan juga dapat meningkatkan keterampilan perangkat desa dalam mengelola dan memperbarui konten yang ada di website.

3) Meningkatkan Partisipasi Masyarakat

Masyarakat desa perlu didorong untuk lebih aktif dalam memanfaatkan website desa, tidak hanya untuk memperoleh informasi tetapi juga untuk memberikan masukan atau melakukan pengawasan terhadap pengelolaan anggaran. Pemerintah desa dapat menyediakan fitur-fitur interaktif, seperti forum diskusi atau kolom pengaduan, yang memungkinkan masyarakat untuk berpartisipasi lebih banyak.

4) Peningkatan Sosialisasi Website Desa

Sosialisasi mengenai keberadaan website desa dan cara mengaksesnya perlu dilakukan secara lebih masif, terutama kepada masyarakat yang masih belum familiar dengan penggunaan internet. Melalui pendekatan yang lebih inklusif, diharapkan seluruh lapisan masyarakat dapat memanfaatkan website desa sebagai sarana untuk meningkatkan transparansi anggaran.

5) Pengembangan Fitur Website

Website desa perlu terus dikembangkan dengan menambahkan fitur-fitur yang lebih interaktif dan informatif. Sebagai contoh, pengembangan fitur pelaporan atau pengaduan yang lebih mudah diakses dapat mendorong masyarakat untuk lebih aktif dalam memberikan feedback mengenai penggunaan dana desa. Fitur-fitur ini dapat meningkatkan partisipasi masyarakat dalam proses pengawasan dan pengambilan keputusan terkait penggunaan anggaran desa.

Dengan adanya perbaikan dan pengembangan lebih lanjut pada aspek-aspek di atas, diharapkan website desa Timika Jaya dapat semakin efektif dalam meningkatkan transparansi anggaran dan memperkuat hubungan antara pemerintah desa dengan masyarakat.

### 6.6.3 Saran untuk Peningkatan

Berdasarkan temuan dan kelemahan yang telah diidentifikasi, terdapat beberapa saran untuk peningkatan efektivitas dan kualitas penelitian serupa maupun implementasi di lapangan.

Pertama, ke depan perlu dilakukan penelitian komparatif antar desa di wilayah Papua atau wilayah 3T (tertinggal, terdepan, terluar) lainnya yang juga menerapkan website desa. Perbandingan ini akan memperkaya wawasan mengenai faktor-faktor keberhasilan dan

tantangan yang umum maupun spesifik dalam penggunaan media digital untuk transparansi anggaran.

Kedua, penting bagi pemerintah desa untuk melakukan penguatan literasi digital secara sistematis dan menyeluruh, baik kepada perangkat desa maupun masyarakat umum. Program pelatihan berbasis komunitas yang mengedepankan metode partisipatif bisa menjadi pilihan strategis agar masyarakat merasa memiliki dan mampu memanfaatkan teknologi secara optimal.

Ketiga, pemerintah desa perlu menjalin kerja sama dengan perguruan tinggi atau organisasi masyarakat sipil untuk membantu pengembangan konten website, pemutakhiran data, serta monitoring dan evaluasi. Kolaborasi lintas aktor akan menciptakan ekosistem digital yang lebih berkelanjutan dan inovatif di tingkat desa.

Keempat, pengembangan fitur website desa perlu diarahkan tidak hanya pada penyampaian informasi, tetapi juga membangun interaksi dua arah dengan masyarakat. Fitur seperti forum diskusi, kotak saran online, hingga sistem pemantauan kegiatan pembangunan secara real time dapat meningkatkan partisipasi masyarakat dan memperkuat kontrol sosial terhadap penggunaan anggaran.

Kelima, di level kebijakan, perlu ada dukungan regulatif dan anggaran dari pemerintah daerah yang mendorong digitalisasi tata kelola desa secara menyeluruh. Hal ini mencakup pengadaan perangkat keras dan lunak, pelatihan teknis, serta insentif bagi desa yang mampu mengelola website secara aktif dan akuntabel.

Dengan penerapan saran-saran tersebut, website desa tidak hanya menjadi sarana informasi satu arah, tetapi juga dapat tumbuh menjadi media komunikasi publik yang demokratis, inklusif, dan berkelanjutan dalam mendorong transparansi dan akuntabilitas anggaran di tingkat lokal.

## DAFTAR PUSTAKA

Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP). (2019). *Panduan Umum Pengelolaan Keuangan Desa*. Jakarta: BPKP.

Babbie, E. (2020). *The Practice of Social Research* (15th ed.). Cengage Learning.

Creswell, J. W. (2013). *Qualitative Inquiry and Research Design: Choosing Among Five Approaches* (3rd ed.). SAGE Publications.

Folscher, A. (2002). *Budget Transparency and Participation: Five African Case Studies*. IDASA.

Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi. (2017). *Pedoman Pengelolaan Dana Desa*. Jakarta: Kementerian Desa PDT.

Indrajit, R. E. (2002). *E-Government: Strategi Pembangunan dan Pengembangan Sistem Pelayanan Publik Berbasis Teknologi Digital*. PT Elex Media Komputindo.

International Budget Partnership. (2023). *Open Budget Survey Methodology*. Retrieved from https://internationalbudget.org/open-budget-survey/methodology/

Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia. (2021). *Panduan Pengelolaan Website Desa*. Jakarta: Kemendesa PDTT.

Mardiasmo. (2018). *Akuntansi Sektor Publik* (Revisi). Yogyakarta: Andi.

Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldaña, J. (2014). *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook* (3rd ed.). SAGE Publications.

Nugroho, R. (2009). *E-Government: Teori dan Praktik*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.

Odedra, M. (2016). *Internet and Web Development: Bridging the Gap Between Digital Literacy and the Development of Society*. Jakarta: Media Indah.

Putra, R. A. (2021). Penerapan Website Desa dalam Meningkatkan Kepercayaan Publik: Studi di Kabupaten Banyuwangi. *Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 11(2), 120–134.

Rahail, A. (2022). Optimalisasi Informasi Publik Melalui Website Desa: Studi Kasus Kampung Yoboi, Jayapura. *Jurnal Informasi dan Desa Digital*, 4(1), 88–99.

Sari, N. P. (2020). Partisipasi Masyarakat dalam Pengawasan Dana Desa melalui Website: Studi Kasus Sleman. *Jurnal Tata Kelola Desa*, 3(2), 56–70.

Setiawan, B. (2020). Peran Teknologi Informasi dalam Pengelolaan Keuangan Desa. *Jurnal Pemerintahan*, 8(2), 112–125.

Sudirman, R. (2017). *Transparansi dan Akuntabilitas Pemerintahan Desa*. Bandung: Alfabeta.

Tanati, E. (2021). Tantangan Literasi Digital dalam Pengelolaan Website Desa di Papua. *Jurnal Pemberdayaan Daerah Terpencil*, 2(2), 44–58.

Yuliana, E. (2021). Penerapan Website Desa untuk Transparansi Anggaran di Era Digital. *Jurnal Administrasi Negara*, 14(3), 98–108.